

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak Amerika mengambil kendali negara Irak pada tahun 2003, yang menyebabkan penggulingan rezim Saddam Hussein, pembongkaran tentara Irak dan kehancuran di struktur pemerintahan yang mengakibatkan vakumnya keamanan dan pemerintahan serta struktur sosial negara yang rapuh dan rusak parah. Selama hampir sembilan tahun (2003-2011), tentara Amerika Serikat ditempatkan di Irak, hanya saja Amerika gagal membangun tentara dan pasukan keamanan yang efektif di Irak untuk mengisi kekosongan yang baru dibuat olehnya itu. Sementara di Irak, Amerika mendorong pembentukan apa yang seharusnya menjadi Negara demokratis oleh rezim Syiah yang dipimpin oleh Nouri al-Maliki. Hanya saja rezim diasingkan oleh populasi Sunni, yang secara tradisional menguasai negara, meskipun mereka adalah golongan minoritas (sekitar 22% dari populasi Irak Arab Sunni --bersama Kurdi, yang juga Sunni, sekitar 60% dari Irak Syiah).¹

Cabang al-Qaeda di Irak, didirikan pada tahun 2004, mengisi kekosongan keamanan dan mengambil keuntungan dari meningkatnya politik-sosial keterasingan Sunni. Hal ini menjadikan mereka sebagai aktor penting dalam organisasi gerilyawan yang memerangi tentara Amerika, menjadi lebih kuat setelah penarikan pasukan

¹ "ISIS: Potrait of a Jihadi Terrorist Organization", dalam http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20733/101_14_Ef_1329270214.pdf, diakses 1 Desember 2015.

Amerika di akhir tahun 2001, dan menyebar ke Suriah setelah perang sipil yang dimulai pada Maret 2011. Pembentukan al-Qaeda dan Negara Islam di Irak dan Suriah terjadi dalam empat tahap:

1. Tahap Pertama (2004-2006) : Pembentukan cabang al-Qaeda di Irak dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi dan disebut dengan "*al-Qaeda in Mesopotamia*". Ini mengobarkan perang teroris-gerilyawan terhadap Amerika dan pasukan koalisi, serta terhadap penduduk Syiah. Tahap pertama ini berakhir ketika Abu Musab al-Zarqawi tewas dalam target serangan Amerika pada bulan Juni 2006.
2. Tahap Kedua (2006-2011) : Pembentukan Negara Islam di Irak (ISI). ISI menjabat sebagai jaringan untuk beberapa organisasi jihad yang terus melancarkan kampanye perang teroris-gerilya melawan Amerika Serikat dan pasukan koalisi, dan penduduk Syiah. ISI melemah menjelang akhir dari keberadaan Amerika di Irak diikuti oleh kesuksesan pergerakan militer Amerika dan kebijakan politik yang bijaksana yang mendukung penduduk Sunni dan Amerika mengetahui bagaimana mereka dapat memenangkan hati dan pikiran mereka.
3. Tahap Ketiga (2012-Juni 2014) : Penguatan ISI dan pendiri ISIS, setelah tentara Amerika menarik diri dari Irak. ISI menjadi lebih kuat dan menyusul pecahnya perang sipil Suriah, ISI mendirikan cabang di Suriah dan disebut front al-Nusra. Pertikaian pecah antara ISI dan cabang Suriah, yang

menyebabkan pula keretakan antara ISI dan al-Qaeda dan pembentukan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

4. Tahap Ketempat (per Juni 2014) : Dramatikanya prestasi militer Negara Islam, yang paling menonjol adalah pengambil-alihan Mosul, kota terbesar kedua di Irak. Pada saat yang sama, Negara Islam mendirikan pengawasan di timur Suriah dimana mereka membuat pusat pemerintahan atau ibukota di al-Raqqah. Dalam kebangkitan keberhasilannya, Negara Islam menyatakan pembentukan sebuah "Negara Khilafah" dipimpin oleh pemimpin Negara Islam yang bernama Abu Bakr al-Baghdadi.²

Sejarah berkata bahwa ada kesamaan antara hasil invasi Amerika Serikat ke Irak, hasil invasi Uni Soviet ke Afghanistan dan invasi Israel ke Lebanon. Ketiga contoh penyerangan negara gagal tersebut, akhirnya membangun tatanan politik baru, dengan mendukung rezim yang ada. Akibatnya, ketiga invasi ini memiliki efek merusak pada sistem politikal-sosial yang ada, contohnya adalah di Afghanistan dan Irak menyebabkan perubahan kontribusi pada pembentukan organisasi teroris jihad radikal Sunni dan di Lebanon, organisasi teroris radikal Syiah berikut ideologi Iran dan menerima dukungan Iran. Organisasi teroris yang didirikan di Irak (cabang al-Qaeda), Afghanistan (al-Qaeda) dan Lebanon (Hizbullah) ada pada saat ini. Negara Islam telah menjadi lebih kuat di Irak dan Suriah, dan mengancam ketertiban dan stabilitas baik di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Selatan bahkan seluruh dunia.³

² *Ibid.*, hlm.20-21.

³ *Ibid.*

Negara Islam berakar terutama di Irak Barat, yang memiliki populasi masyarakat Sunni (terutama di provinsi al-Anbar, yang meluas ke perbatasan Suriah). Gerakan gerilya dan aktivitas teroris yang dilakukan organisasi pasca kematian al-Zarqawi memuncak pada tahun 2006-2007 dengan serangan ke Amerika Serikat dan pemerintah Irak Syiah yang berafiliasi, dan pada saat yang bersamaan pula, Negara Islam membangun administrasi sipil di daerah Sunni dibawah kendalinya, sebagai alternatif untuk pemerintah pusat.⁴

Penarikan pasukan Amerika dari Irak pada Desember 2011 meninggalkan kekosongan keamanan militer, yang memungkinkan bagi Negara Islam untuk membangun dan mengumpulkan kekuatan untuk memperbaharui kampanye teroris terhadap populasi Syiah dan pemerintah pusat Irak. Hal itu dilakukan untuk mendorong perang saudara antara Sunni dan Syiah. Selain itu, perang saudara yang pecah di Suriah pada Maret 2011 melemahkan rezim Assad dan memberikan Negara Islam kesempatan untuk mengirimkan kooperasi ke Suriah dan mempengaruhi ideologi jihad sampai akhirnya berhasil dalam beberapa tahun, untuk mengambil alih sekitar seperempat dan sepertiga wilayah Suriah di timur dan utara.⁵

Kembalinya masa emas dunia Islam, menurut Negara Islam, terjadi melalui pembangunan kembali kekhilafahan Islam, berdasarkan interpretasi Salafi jihadi hukum agama Islam (syariah). Pembentukan Negara Khilafah yang dinyatakan oleh Negara Islam, saat ini termasuk sebagian besar Irak dan Suriah, dari pinggiran Baghdad ke pinggiran Aleppo. Namun, Negara Islam berusaha untuk memperluas

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Negara Khilafahnya dari sisa daerah di Irak dan Suriah, menggulingkan rezim di Baghdad dan Damaskus, dan kemudian menyebar ke wilayah lainnya (Irak, Suriah, Lebanon, Israel/Palestina, Yordania, dan bahkan Kuwait). Namun, ambisi Negara Islam tidak hanya melampaui area Suriah dan sekitarnya. Menurut visinya, kekhilafahan di Suriah akan menjadi inti dari kekhilafahan Islam. Hal itu akan mencakup negara-negara di Timur Tengah, Afrika Utara, sebagian dari Iran, Pakistan dan Afghanistan, negara-negara Eropa yang pernah ditaklukan oleh Islam (Spanyol dan negara Balkan), dan negara-negara Muslim lainnya.⁶

Seperti organisasi lain yang berjenis sama, Negara Islam memusuhi Amerika Serikat dan Barat dan juga berkomitmen untuk mengobarkan rasa jihad demi melawan mereka. Negara Islam telah jelas membuat banyak publikasi yang diarahkan kepada negara-negara Barat melalui tindakannya, terutama setelah Amerika memulai kampanye menentang mereka (mengeksekusi sandera dan mendorong pendukungnya untuk melakukan serangan teroris terhadap warga sipil Barat di seluruh dunia).⁷

Proyek Islam Khilafah yang dicanangkan oleh Negara Islam menarik banyak perhatian para pejuang asing dari seluruh dunia. Ketika menjadi mercusuar bagi para pejuang asing selama beberapa tahun terakhir, Negara Islam sekarang mengontrol banyak perekrutan dan jaringan fasilitas/logistik. Selanjutnya, mereka yang telah berjuang bersama Negara Islam membuat koneksi dengan satu sama lainnya dan akan tetap berhubungan ketika mereka kembali ketempat asal mereka. Solidaritas dan persaudaraan terjalin saat pertempuran dan bertahan dari kesulitan yang mereka

⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

hadapi yang merupakan dasar dari hubungan ini dan akan menjadi penting untuk masa depan pergerakan jihad. Negara Islam juga terus membangun prestise dan legitimasi dalam ke keseluruhan gerakannya.⁸ Serangan-serangan tersebut menimbulkan efek terorisme dan menjadi ancaman keamanan yang nyata. Secara paralel, balasan dari upaya menghadapi dilemma teroris ini berupa: hukum, Negara berhak dan/bahkan wajib untuk mengambil langkah dalam rangka melindungi kesejahteraan warga negaranya.⁹

Eropa memiliki arti yang kian penting seiring dengan berlangsungnya proses integrasi. Proses ini diawali dengan terbentuknya *European Coal and Steel Community* (Komunitas Baja dan Batubara Eropa) di tahun 1951; pada tahun 1957, kerjasama sektoral ini berkembang dengan pembentukan *European Atomic Community* (Komunitas Atom Eropa) dan *European Economic Community* (Komunitas Ekonomi Eropa). Komitmen lebih besar bagi integrasi muncul pada tahun 1986 dengan pembentukan *European Community* (Komunitas Eropa), yang menandai kerjasama dalam bidang ekonomi yang luas dalam pasar terintegrasi. Pada tahun 1992, nama Uni Eropa diadopsi untuk mewadahi kerjasama-kerjasama sektoral yang sudah ada dan sekaligus untuk memperkuat komitmen bagi kerjasama dalam politik luar negeri, keamanan dan urusan-urusan domestik Negara-negara anggotanya.¹⁰

⁸ Aaron Y. Zelin, "The War Between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of The Global Jihadist Movement" (Online), dalam http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf, diakses 1 Desember 2015.

⁹ "RLM_EU_Terrorist_Listing", dalam http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/RLM_EU_Terrorist_Listing.pdf, diakses 1 Desember 2015.

¹⁰ Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 145.

Eropa mempunyai *European Security Strategy* (ESS) yang diadopsi oleh Dewan Eropa pada tanggal 12-13 Desember 2003, menyediakan kerangka kerja konseptual untuk Kebijakan Keamanan Luar Negeri (CFSP), termasuk apa yang kemudian akan menjadi Keamanan Umum dan Kebijakan Pertahanan (CSDP). Perpecahan antara negara anggota Uni Eropa selama invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, menyoroti kebutuhan untuk visi strategis umum juga untuk meningkatkan kohesi internal pada tingkat Uni Eropa. Dalam kerangka ini, ESS mempunyai lima poin utama:

1. Terorisme;
2. Perkembangbiakan Senjata Pemusnah Massal;
3. Konflik Regional;
4. Kegagalan Negara; dan
5. Kejahatan Terorganisir.¹¹

Eropa merupakan target utama untuk kejahatan terorganisir. Hal ini menjadikan keamanan Eropa memiliki dimensi eksternal penting diantaranya adalah perdagangan obat di perbatasan, perempuan, imigran ilegal dan senjata yang sebagian besar untuk kegiatan kelompok kriminal yang semuanya dapat memiliki hubungan dengan terorisme.¹²

Oleh karenanya, Eropa memiliki sebuah institusi-institusi terkait yang dapat membantu dalam memerangi kelima point diatas, seperti Europol, Eurojust dan agensi-agensinya. Agensi-agensinya tersebut berkoordinasi dengan Uni Eropa dalam

¹¹ "A Secure Europe In A Better World", dalam <http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security-strategy/>, diakses 10 Desember 2015.

¹² *Ibid.*

rangka memelihara keamanan di Eropa. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kerjasama antara otoritas berwenang dari anggota menyatakan terutama dengan berbagi dan mengumpulkan intelijen untuk mencegah dan memberantas kejahatan terorganisir serius internasional. Misinya adalah untuk membuat kontribusi yang signifikan terhadap upaya penegakan hukum Uni Eropa menargetkan kejahatan terorganisir.¹³

Strategi Keamanan Eropa memandang peran sentral dan memberikan kesempatan bagi Europol untuk memenuhi mandatnya serta memberikan dukungan operasional dalam melawan kejahatan terorganisir dan terorisme. Pusat strategi ini adalah persetujuan ide model keamanan Eropa berdasarkan kepemimpinan intelijensi kepolisian. Hal ini akan membantu untuk menentukan prioritas umum Uni Eropa dan lebih memahami ancaman terhadap keamanan Uni Eropa. Mengacaukan jaringan kriminal dan teroris internasional menjadi inti dan tugas yang paling penting untuk Europol.¹⁴

Dalam kasus serangan Paris pada tanggal 13 November 2015 yang menewaskan 130 orang, membuat geram pemerintahan Perancis dan Negara-negara Eropa lainnya, setelah dikabarkan bahwa Negara Islam bertanggungjawab atas serangan tersebut. Sebelum kasus ini terjadi, Eropa dihadapkan dengan membanjirnya imigran yang mencari suaka di Negara-negara Eropa. Imigran tersebut kebanyakan berasal dari Suriah yang sudah tidak merasa aman lagi di negaranya sendiri disebabkan oleh perang. Namun, tidak semua imigran tersebut benar-benar ingin

¹³ "About Europol", dalam <https://www.europol.europa.eu/content/page/europol>, diakses 10 Desember 2015.

¹⁴ "A Secure Europe In A Better World", *Loc.Cit.*

mencari suaka ke Eropa, ada sebagian anggota Negara Islam yang kembali ke Negara asalnya yang berpura-pura menjadi pencari suaka dan memberikan “kejutan” sehingga kriminalitas bahkan terror di Eropa kembali meningkat. Mengingat Negara Islam adalah kelompok kejahatan terorganisir, hampir seluruh Negara Eropa memberikan pengawasan terhadap para pencari suaka yang telah ada di Eropa dan meningkatkan serta memperketat keamanan mereka terutama di daerah perbatasan.¹⁵

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul: **PENGARUH GERAKAN POLITIK NEGARA ISLAM IRAK DAN SURIAH (ISIS) TERHADAP STABILITAS POLITIK-KEAMANAN DI KAWASAN EROPA.**

B. Identifikasi Masalah

Negara Islam yang sudah dianggap sebagai kelompok kejahatan terorganisir yang didalamnya berupa kriminalitas dan terorisme bagi Negara-negara Barat telah melakukan aksi yang mencengangkan. Dalam kasus serangan di Paris, Negara Islam mengatakan bahwa mereka bertanggungjawab atas serangan tersebut, sehingga membuka mata Negara-negara Eropa untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan serta memperketat keamanan kawasannya.

Berdasarkan pernyataan yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

¹⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2015/11/17/350237/eropa-antisipasi-teroris-berkedok-pencari-suaka>, diakses 10 Desember 2015

1. Bagaimana bentuk perjuangan gerakan politik Negara Islam di Eropa?
2. Sejauh mana persepsi ancaman gerakan politik Negara Islam terhadap perkembangan stabilitas politik-keamanan di Eropa?
3. Sejauh mana arah dan tindakan Uni Eropa dalam memelihara stabilitas politik-keamanan dan korelasinya dengan persepsi ancaman gerakan politik Negara Islam di Eropa?

1. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu kompleks dan luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah tersebut dengan menitikberatkan kepada proses tindakan Uni Eropa serta persepsi ancaman gerakan politik Negara Islam.

2. Perumusan Masalah

Guna mempermudah dalam penganalisaan permasalahan tersebut yang berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Mengingat luasnya kajian dalam masalah ini, maka penulis mencoba merumuskan masalah untuk penelitian sebagai berikut: **“Sejauh mana proses tindakan Uni Eropa dalam memelihara stabilitas politik-keamanan serta menghadapi persepsi ancaman gerakan politik Negara Islam di Eropa.”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha memperdalam pemahaman dan pengetahuan akan suatu permasalahan dengan menggunakan cara-cara yang

sistematis dan metodologis. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan-penelaahan serta mengembangkan bidang yang diteliti. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana bentuk perjuangan gerakan politik Negara di Eropa.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana persepsi ancaman gerakan politik Negara Islam terhadap perkembangan stabilitas politik-keamanan di Eropa.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana arah dan tindakan Uni Eropa dalam memelihara stabilitas politik-keamanan dan korelasinya dengan persepsi ancaman gerakan politik Negara Islam di Eropa.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan komperatif bagi penelitian yang sejenis, dan aspek-aspek yang belum terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, baik bagi pembaca umum maupun penstudi Hubungan Internasional lainnya pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh gerakan politik Negara Islam terhadap stabilitas politik-keamanan di kawasan Eropa.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Strata-1 Hubungan Internasional Universitas Pasundan.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat teori, konsep, pendapat ahli atau jenis pengetahuan ilmu lainnya, yang dirangkaikan sedemikian rupa dan membentuk struktur pengetahuan yang lengkap dan komprehensif, yang dirumuskan dalam premis mayor yaitu teori yang bersifat umum dan juga premis minor yaitu teori yang bersifat khusus yang berkaitan dengan pembahasan.

Hubungan Internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan konflik (*conflict*) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan Internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya. Seorang pakar ilmu Hubungan Internasional, KJ. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional dalam Kerangka Analisa* adalah sebagai berikut:

“Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”¹⁶

¹⁶ KJ. Holsti. *Politik Internasional Dalam Kerangka Analisa*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hlm. 25-27.

Dalam pembahasan yang berhubungan dengan masalah internasional diperlukan suatu konsep dan teori sebagai landasan berpikir. Untuk itu masalah internasional tidak mungkin begitu saja meninggalkan sistem internasional. Menurut KJ. Holsti, sistem internasional adalah:

“Sistem internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan kesatuan politik yang independen seperti suku, negara, kota, bangsa dan kerajaan, yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses yang teratur, para pengkaji mempunyai pengertian untuk menjelaskan keistimewaan atau karakteristik perilaku unit politik tersebut satu sama lain dan menerangkan berbagai perubahan besar dalam interaksinya.”¹⁷

Studi Hubungan Internasional memiliki banyak teori ataupun perspektif yang kerap digunakan, salah satunya adalah teori realisme. Mereka yang menganut paham realis beranggapan *power* merupakan salah satu faktor dominan dalam suatu interaksi, dan perdamaian internasional dapat dicapai dengan perimbangan kekuatan. Seperti yang diungkapkan oleh Morgenthau tentang pendekatan realisme:

“Untuk menjamin agar tidak ada negara-negara berkekuatan besar (*great powers*) berhasil mencapai posisi hegemoni atas dominasi keseluruhan, berdasarkan intimidasi, paksaan atau penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang, adalah penting bagi suatu negara untuk membangun dan memelihara keseimbangan kekuatan militer. Keamanan nyata-nyata merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam hubungan internasional.”¹⁸

Teori diatas memberikan dasar bagi digunakannya definisi Hubungan Internasional sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan nasional setiap bangsa dan negara yang tidak dapat dicapai oleh kekuatan sendiri, akan tetapi harus melalui interaksi dengan negara lain dimana interaksi tersebut dapat berbentuk hubungan antara pemerintah maupun non-pemerintahan. Interaksi tersebut dapat berupa

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 5.

hubungan diplomatik, persekutuan/aliansi, peperangan, negosiasi, ancaman, kekuatan militer, budaya, ekonomi, ikatan ras dan etnis dan hubungan antar manusia yang tinggal di negara yang berbeda. Sehingga dalam hubungan ini jelas akan adanya politik-politik dari sebuah negara menjadi politik internasional, menurut Yusuf Rankel dalam bukunya yang berjudul *International Politics Conflict and Harmony* bahwa:

“Politik menurutnya bertolak dari adanya fakta sosial yang memperlihatkan bahwa manusia memiliki beberapa keinginan yang tidak dapat dilakukan melalui usaha-usaha individu, sehingga manusia mengorganisasikan dirinya dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Pengelompokan itu kemudian menentukan pola tingkah laku manusia baik yang langsung maupun tidak langsung serta dikaitkan dengan kekuasaan (*authority of power*) dan kaidah-kaidah lainnya. Kelompok itu baik dalam negara, bangsa maupun organisasi mengikat dan melakukan berbagai kegiatan dan beraksi membentuk apa yang disebut dengan politik internasional.”¹⁹

Dalam menjalani suatu hubungan baik bilateral maupun multilateral dalam rangka untuk mencapai suatu kepentingan negaranya masing-masing, dibentuklah suatu organisasi internasional yang mewadahi negara-negara tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations* yaitu:

“Organisasi Internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggota.”²⁰

Hampir kebanyakan organisasi internasional terletak di suatu kawasan. Menurut T.V. Paul dalam artikelnya *International Relations Theory and Regional* bahwa *“a region as a cluster of states that are proximate to each other and are*

¹⁹ Natasha Gultom, “Politik Internasional” (Online), <http://tashagultomblog.blogspot.co.id/2011/06/politik-internasional.html>, diakses 14 Desember 2015.

²⁰ Clive Archer, *International Organizations*. (London: Allen & Unwin Ltd, 2001), hlm.35.

*interconnected is spatial, cultural and ideational terms in a significant and distinguishable manner.*²¹ Menurut Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus*

Hubungan Internasional mengenai kawasan adalah sebagai berikut:

“Proses pembentukan perjanjian, institusi dan regulasi pada tingkat regional untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan politik di antara Negara-negara dari kawasan yang sama. Elemen-elemen yang menjadi fokus integrasi regional antara lain adalah (a) penghapusan hambatan perdagangan antarnegara; (b) peningkatan pergerakan orang tenaga kerja, barang dan modal; (c) pengurangan terjadinya konflik interregional; dan (d) penyusunan kebijakan bersama di berbagai bidang.”²²

Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan Negara-negara Eropa dan mempunyai kebijakan tersendiri. Seperti yang diutarakan oleh K.J. Holsti sebagai berikut:

“Kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain.”²³

Sebuah organisasi internasional terutama yang terbentuk dari kesadaran serta keinginan untuk mencapai suatu tujuan regional, tidak akan lepas dari aspek keamanan dan juga konflik. Keamanan akan menjaga keseluruhan regional dari hal-hal yang akan mengganggu tercapainya tujuan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Barry Buzan dalam bukunya *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era* bahwa:

“Keamanan dalam konteks sistem internasional adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsionalis mereka. Untuk mencapai keamanan, kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya.

²¹ T.V. Paul, “International Relations Theory and Regional” http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/International_Relations_Theory_and_Regio.pdf diakses 12 Januari 2016

²² Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015), hlm 379.

²³ K.J. Holsti., *Loc.Cit.*

Dalam studi Hubungan Internasional dan Politik Internasional, keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional.”²⁴

Penyimpulan Buzan menyebutkan bahwa aspek keamanan telah menjadi satu pendekatan dalam studi Hubungan Internasional kontemporer dengan menunjuk kepada motif utama perilaku negara yang memiliki perbedaannya sendiri dengan *power* sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk terciptanya perdamaian.²⁵

Upaya membangun keamanan bersama antara lain dilakukan melalui *confidence-building measures, arms control*, kerja sama multilateral, dan peningkatan fungsi PBB yang terkait dengan konsep *collective security*. Konsep *common security* antara lain diterapkan di Eropa melalui pembentukan *Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE)* pada tahun 1975 yang kemudian berubah menjadi *Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)*.²⁶ Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang dikeluarkan untuk membangun keamanan bersama tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dkk. dalam bukunya *Kamus Analisa Politik* menyatakan bahwa :

“Strategi adalah suatu anjang-ancang untuk mengalahkan lawan atau mencapai tujuan lain, Strategi biasanya mengacu pada rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh. Sebaliknya, taktik, terdiri dari gerakan tunggal atau serangkaian langkah terbatas ke arah tujuan antara (*intermediate*) di dalam perencanaan strategi yang lebih luas.”²⁷

²⁴ Barry Buzan. *People State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era*, (London: Pinter, 1991), hlm.2.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Khasan Ashari, *Loc.Cit.*

²⁷ Jack C. Plano dkk., *Kamus Analisa Politik* (Terjemahan Edi S. Siregar) (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 253-254.

Kebijakan luar negeri yang disepakati secara kolektif oleh negara-negara Uni Eropa yang mencakup aspek diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan (*defence and security*).

“Aspek-aspek yang menjadi cakupan CFSP ditetapkan dalam *Lisbon Treaty* yang mulai berlaku bulan Desember 2009 dan meliputi: (1) Pengamanan nilai bersama, kepentingan dasar, independensi dan integritas Uni Eropa sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB; (2) Peningkatan keamanan Uni Eropa secara keseluruhan; (3) Pemeliharaan perdamaian dan peningkatan keamanan internasional; (4) Peningkatan kerja sama internasional; serta (5) Pembangunan dan konsolidasi demokrasi dan penegakan hukum berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan. CFSP diimplementasikan dalam bentuk aksi bersama (*joint action*) dan posisi bersama (*common position*). *Joint Action* dilakukan pada situasi yang dipandang perlu dengan tujuan, cakupan, dan cara yang disepakati bersama. *Common position* merujuk pada panduan mengenai isu atau wilayah geografis tertentu yang harus direfleksikan dalam kebijakan nasional negara-negara anggota. Kebijakan kolektif ini harus diputuskan secara bulat (*unanimity*) oleh seluruh anggota Uni Eropa melalui lembaga *Council of The European Union* atau Dewan Uni Eropa.”²⁸

Salah satu isu yang sedang dihadapi oleh Uni Eropa terhadap konsep keamanan bersamanya ini adalah terorisme. Menurut Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* bahwa terorisme adalah:

“*International Convention for The Suppression of Financing of Terrorism* tahun 1999 mendefinisikan terorisme sebagai setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau luka fisik yang serius di kalangan sipil atau pihak yang tidak mengambil bagian dalam situasi politik bersenjata. Tujuan tindakan tersebut adalah untuk mengintimidasi penduduk, pemerintah, atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Aksi teror dipilih untuk menarik perhatian dan menimbulkan rasa tidak aman guna menekan pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan. Target yang dituju umumnya adalah sasaran antara untuk memanipulasi target dan tujuan utama. Secara umum terorisme memiliki empat elemen utama yaitu: (1) *Premeditation* atau keputusan pelaku untuk melakukan aksi dengan tujuan menimbulkan rasa takut pihak lain; (2) Motivasi atau faktor penyebab yang berdimensi politik, ekonomi maupun agama; (3) Target yang umumnya adalah non-hambatan seperti tokoh politik, birokrat atau kalangan sipil; (4) *Secretiveness* atau sifat tertutup aktivitas teroris. Peristiwa serangan teroris ke Amerika Serikat tanggal 11 September 2001 menandai dimulainya babak baru isu terorisme dalam Hubungan Internasional. Peristiwa tersebut meningkatkan kesadaran

²⁸ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 107.

tentang keberadaan terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Terorisme juga merupakan isu yang kontroversial. Pada satu sisi banyak pihak berpendapat bahwa ketidakadilan pada tingkat global maupun nasional merupakan penyebab utama dipilihnya terorisme sebagai cara untuk mencapai tujuan. Pada sisi lain terorisme juga dimanfaatkan oleh negara-negara untuk mengamankan kepentingannya, baik dengan cara mendukung aksi teror yang dilakukan kelompok teroris maupun menjalankan kebijakan atas nama pemberantasan terorisme. Kekhawatiran masyarakat internasional akan gerakan terorisme global semakin meningkat karena keterkaitan antara terorisme dengan bentuk kejahatan lintas negara yang lain seperti pencucian uang dan perdagangan gelap narkoba.”²⁹

Dengan adanya isu terorisme ini, Uni Eropa meningkatkan stabilitas keamanannya. Seperti yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dkk mengenai definisi stabilitas bahwa:

“Stabilitas adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap di dalam, atau kembali pada, suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau di dalam suatu sistem politik atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan.”³⁰

Hanya saja dengan munculnya organisasi-organisasi radikal Islam seperti Negara Islam, membuat Uni Eropa merasa terancam karena dapat mengganggu tujuannya, sehingga kehadiran Negara Islam menimbulkan suatu dilema keamanan seperti yang dikemukakan oleh Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* yang menyatakan bahwa:

“Dilema keamanan atau *Security Dilemma* merupakan konsep teori realisme yang didasarkan pada asumsi bahwa tindakan suatu Negara meningkatkan kekuatan militernya dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara lain. Teori realisme berpandangan bahwa Negara-negara mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan antara meningkatkan dan tidak meningkatkan kekuatan militer mereka. Pada satu sisi, tindakan membangun kekuatan militer dapat dipersepsikan sebagai ancaman sehingga memicu Negara-negara lain melakukan tindakan serupa. Pada sisi lain, kebijakan untuk tidak membangun kekuatan militer menjadikan suatu Negara *vulnerable* dan menempatkannya pada posisi terancam. Teori

²⁹ *Ibid.*, hlm. 421.

³⁰ Jack C. Plano dkk., *Op.Cit.*, hlm. 253-254.

realism menganggap *security dilemma* sebagai salah satu elemen penting yang mempengaruhi pembentukan sistem internasional.”³¹

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.³² Adapun pengertian dari konflik menurut Khasan Ashari adalah sebagai berikut :

“Konfrontasi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan. Konflik dapat bersifat nyata dengan karakter dapat dikenali dari tindakan atau perilaku para pihak. Konflik juga dapat bersifat laten dengan karakter tidak terlihat namun belum sepenuhnya terselesaikan sehingga memiliki potensi untuk muncul kembali. Terdapat tiga bentuk konflik dalam konteks hubungan internasional yaitu (a) konflik antarnegara; (b) konflik internal; (c) konflik yang pengaruh pada pembentukan negara baru. Konflik antarnegara merupakan salah satu isu utama hubungan internasional dan upaya mencegah serta mengatasi konflik jenis ini telah sejak lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Perhatian masyarakat internasional terhadap konflik internal yang terjadi di suatu negara juga semakin meningkat dewasa ini. Hal ini disebabkan oleh besarnya dampak yang ditimbulkan oleh konflik internal terhadap warga negara tempat konflik berlangsung maupun terhadap negara-negara di sekitarnya. Meskipun konflik internal merupakan persoalan domestik suatu negara, pandangan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik jenis ini semakin menguat. Keterlibatan masyarakat internasional untuk menyelesaikan konflik internasional dapat dilakukan melalui intervensi atau mediasi. Pendekatan ini juga lazim diimplementasikan

³¹ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 393.

³² “Pengertian dan Teori Konflik”, dalam <http://letsayafpw.blogspot.com/2013/01/konflik-organisasi.html>, diakses 12 Januari 2015.

untuk menyelesaikan konflik yang mengarah pada pembentukan negara baru.”³³

Konflik yang ada dalam organisasi tidak selalu datang dari internal tetapi juga datang dari eksternal organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dengan mendatangkan konflik tersebut seperti keberadaan Negara Islam di Uni Eropa yang mengakibatkan keamanan di Uni Eropa terganggu.

Islam adalah sebuah agama yang multiinterpretatif, membuka kemungkinan kepada banyak penafsiran mengenainya (*a polyinterpretable religion*). Meskipun pada tingkat yang paling umum hanya ada satu Islam, bentuk dan ekspresinya beragam dari satu individu Muslim ke individu Muslim lainnya.³⁴

Hubungan politik dengan Islam dan negara seringkali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang dirumuskan dalam cara sedemikian rupa sehingga yang pertama secara konfrontatif dijajarkan dengan yang terakhir. Demikianlah tampaknya dipandang, bahwa antara keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang saling melengkapi. Karena itu, setidaknya pada awalnya, kandungan ideologis dan kerangka konstitusional menjadi faktor-faktor amat penting dalam menentukan watak sebuah negara Islam. Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia. Islam, dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir dimana-mana (*omnipresence*). Ini sebuah

³³ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm.116.

³⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara “Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Democracy Project Edisi Digital, 2011), hlm. 5.

pandangan yang mengakui bahwa kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.³⁵

Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Penubuhannya dinyatakan dalam *Syari'ah* (Hukum Islam). Bahkan sebagian kalangan Muslim melangkah lebih jauh, mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Tak diragukan lagi, mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh sehingga, menurut mereka, Islam meliputi tiga "D" (*Din*; Agama, *Dunya*; Dunia, *Dawlah*; Negara).³⁶

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multiinterpretatif. Pada sisi lain, hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam yang multiinterpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda mengenai hubungan antara Islam dan politik. Terdapat dua pemikiran politik dalam Islam, yaitu Sunni dan Syiah.

Kepemimpinan dalam Sunni berbeda dengan Syi'ah. Perbedaannya adalah doktrin Syi'ah tentang imamah dan konsep Sunni tentang kekhilafahan. Khalifah dipilih atau pengganti Nabi yang terpilih, dia berhasil dalam kepemimpinan politik dan militer, bukan dalam otoritas keagamaan nabi. Sebaliknya, kepemimpinan Syi'ah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

dalam masyarakat Muslim diberikan dalam imam (pemimpin) yang meskipun bukan seorang Nabi, melainkan pemimpin agama dan politik yang mendapat ilham Tuhan, terbebas dari dosa dan sempurna. Asal-usulnya secara langsung berasal dari Nabi Muhammad dan Ali. Dengan demikian, otoritasnya disucikan.³⁷

Sebenarnya tidak ada perbedaan berarti antara golongan Syi'ah dan Sunni dalam hal inti keimanan. Al-Quran dipandang oleh kedua golongan itu sebagai peran suci Allah SWT, dengan kata lain konsep ideal golongan Sunni juga disepakati oleh golongan Syi'ah. Permasalahan sebenarnya bersumber pada sejarah masa lalu yang sangat bersifat politis, bukan dari segi teologi Islam.³⁸

Salah satu perbedaan yang juga mencolok antara golongan Sunni dan Syi'ah adalah sifat oposisi dan perlawanan yang ditunjukkan oleh paham ini terhadap penguasa tiran, seperti yang juga dikatakan oleh Imam Khomeini, "Banyak orang Sunni mungkin menilai pemberontakan menentang pemerintahan tiran ini sebagai upaya yang tidak sesuai dengan Islam. Hal ini terjadi karena adanya pandangan yang menyatakan bahwa seorang penguasa tiran pun harus dipatuhi." Pandangan ini didasari penafsiran keliru terhadap ayat al-Quran yang berkenaan dengan *ikhwal* kepatuhan. Sebaliknya, orang Syi'ah yang mendasari pemahaman terhadap Islam melalui sumber yang berasal dari Ali dan keturunannya, menilai hanya para imam atau orang yang mereka tunjuk yang berhak sebagai pemegang kekuasaan.³⁹

³⁷ "Pemikiran Politik Sunni", dalam <http://iethafairuz.blogspot.com/2013/12/pemikiran-politik-sunni.html>, diakses 2 Januari 2016.

³⁸ Muslim Mufti, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 129.

³⁹ *Ibid.*, hlm 130.

Pandangan ini sesuai dengan penafsiran ayat al-Quran yang berkenaan dengan kekuasaan. Penafsiran tersebut dibuat oleh Rasulullah SAW. Akar permasalahan sebenarnya terletak pada negara-negara yang ditempati Sunni membenarkan kepatuhan terhadap para penguasa mereka. Orang Syi'ah selalu yakin akan kebenaran pemberontakan.⁴⁰

Latar belakang terbentuknya gerakan Islam adalah demi memenuhi seruan Allah SWT di dalam al-Quran, yaitu: "*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*"(QS. Ali Imran (3): 104). Secara garis besar gerakan adalah sekelompok atau suatu kumpulan orang yang mempunyai target tertentu, berusaha bergerak serta berupaya untuk mencapainya. Dengan demikian, sebuah kelompok dapat disebut sebagai gerakan apabila: (1) mempunyai landasan tertentu; (2) mempunyai tujuan atau target yang telah ditetapkan; (3) mempunyai metode untuk meraih target.⁴¹

Terdapat empat gerakan dalam Islam yaitu Islam Moderat, Islam Liberal, Islam Fundamental serta Islam Radikal :

1. Islam Moderat, Islam yang mampu berdialektika dengan lingkungan dan teguh dalam berteologi. Bagi Islam Moderat hal ini memang tidak mudah. Butuh banyak perangkat untuk menjadikan hidup beragama secara moderat. Beragama secara moderat tidak kemudian membuat orang tidak konsisten. Di satu sisi memegang teguh dasar teologi, tapi di sisi lain harus menyesuaikan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 131.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 235.

dengan kondisi lingkungan. Padahal seringkali lingkungan itu bertolak belakang dengan teologi-normatif. Maka menurut Islam moderat disitulah indahnya orang beragama yang harus dimaknai secara luas. Kalau tidak dipahami secara luas, maka agama akan bergeser menjadi alat untuk menjustifikasi kesalahan-kesalahan orang lain.⁴²

2. Islam Liberal, dapat dikatakan sebagai Islam yang liberal atau bebas. Gerakan Islam liberal bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan. Islam liberal tidak setuju dengan pemberlakuan *syariat* Islam secara formal oleh negara, memperjuangkan sekularisasi, emansipasi wanita, menyamakan agama Islam dengan agama yang lain (*pluralism* teologi), memperjuangkan demokrasi barat dan lain-lain. Islam liberal hadir untuk menyampaikan pesan wajah Islam yang lain, yaitu Islam yang *non-ortodoks*, Islam yang berorientasi ke masa depan bukan ke masa silam dan mendewakan modernitas, sehingga Islam harus disesuaikan dengan kemodernan. Jika terjadi konflik antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas, yang harus dilakukan bukanlah menolak, melainkan menafsirkan kembali ajaran tersebut. Disinilah inti dari sikap dan doktrin Islam liberal.⁴³
3. Islam Fundamental, merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk kembali pada pandangan hidup dan praktek dasar ortodoksi agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi ciri Islam pada masa permulaan

⁴² "Islam Garis Lurus, Islam Moderat dan Islam Garis Lengkung", dalam <http://www.muslimoderat.com/2015/08/islam-garis-lurus-islam-moderat-dan.html>, diakses 5 Januari 2016.

⁴³ Muslim Mufti, *Op.Cit.*, hlm. 253-254.

sejarahnyanya. Fundamentalisme Islam muncul karena ketidakpuasan terhadap masyarakat dunia (khususnya umat Islam) yang kian menyimpang dari ajaran Islam dan gerakan ini tidak anti sains.⁴⁴

4. Islam Radikal, merupakan paham keislaman atau aliran dalam Islam yang menginginkan dan mencita-citakan perubahan sosial dan politik yang sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan dengan tindak-tanduk kekerasan dan drastis.⁴⁵

Definisi Radikalisme secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *radix*, yang berarti akar.⁴⁶ Menurut Khasan Ashari dalam bukunya bahwa “radikalisme merupakan teori yang menyebutkan bahwa aktivitas politik harus bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang bersifat fundamental. Berdasarkan teori ini perubahan harus dimulai dengan identifikasi akar permasalahan dan dilanjutkan dengan pembentukan tatanan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut.”⁴⁷

Dalam upaya penyebaran ideologi radikal di era globalisasi ini, para Muslim radikal memanfaatkan kemudahan di era ini dengan melakukan penyebaran informasi melalui komunikasi internasional menyebarkan propaganda mereka yang menjangkau seluruh pelosok dunia. Kata globalisasi menurut etimologi diambil dari bahasa Inggris *global* dan *ization*, yang berarti penduniaan atau penyatuan dunia dalam satu

⁴⁴ Agus Herlambang (Ed.), *Kemunculan Fundamentalisme Islam: Sebuah Paradoks Globalisasi* (Bandung: FISIP HI UNPAS, 2009), hlm. 1.

⁴⁵ Hadi, "Akar Kemunculan Islam Radikal di Indonesia Menurut Prof. Afif Muhammad (1)" *Liputan Islam* (Online), 26 April 2014, dalam <http://liputanislam.com/terorisme/akar-kemunculan-islam-radikal-di-indonesia-menurut-prof-afif-muhammad-1/>, diakses 5 Januari 2016.

⁴⁶ "Radical", dalam <http://www.etymonline.com/index.php?term=radical>, diakses 13 Januari 2016.

⁴⁷ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 372.

tatanan global.⁴⁸ Mengenai definisi globalisasi, Khasan Ashari dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* mengatakan bahwa:

“Globalisasi adalah konsep multidimensi yang menggambarkan dua fenomena yaitu (a) meningkatnya integrasi ekonomi, komunikasi dan budaya melintasi batas negara; (b) berkurangnya peran negara dalam mengendalikan proses integrasi tersebut. Globalisasi bukan merupakan fenomena baru namun perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi dewasa ini membuat globalisasi berlangsung dalam tingkat, kecepatan dan cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan fenomena serupa yang terjadi pada masa lalu.”⁴⁹

Mengenai definisi informasi, P.H. Collin dalam bukunya yang berjudul *Dictionary of Politics and Government: Third Edition* menyatakan bahwa informasi merupakan “detail atau fakta mengenai sesuatu atau seseorang.”⁵⁰

Dedy Djamaluddin Malik, Jalaluddin Rakhmat, dan Mohammad Shoelhi dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Internasional* menjelaskan bahwa komunikasi internasional merupakan “komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas.”⁵¹ Mereka juga menambahkan bahwa komunikasi internasional terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Perspektif diplomatik, komunikasi internasional lazimnya dilakukan secara interpersonal atau kelompok kecil. Jalur diplomatik atau komunikasi secara langsung antara pejabat tinggi negara lebih banyak dipergunakan untuk

⁴⁸ “Globalization-Origin of the Word?”, dalam <http://www.mrglobalization.com/globalisation/252-globalization--origin-of-the-word>, diakses 13 Januari 2016.

⁴⁹ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 209.

⁵⁰ P.H. Collin, *Dictionary of Politics and Government: Third Edition* (London: Bloomsbury, 2004), hlm. 122.

⁵¹ Dedy Djamaluddin Malik, Jalaluddin Rakhmat, dan Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993), hlm. y.

memperluas pengaruh dan mengatasi ketidaksepakatan, salah pengertian ataupun pertentangan dalam masalah tujuan dan kepentingan setiap negara, memperteguh keyakinan, dan menghindarkan konflik.

- b. Perspektif jurnalistik, komunikasi internasional dilakukan melalui saluran media masa cetak dan elektronik. Arus informasi yang bebas dan terbuka dari negara-negara maju yang datang melalui media tersebut saat ini dinilai lebih merugikan negara berkembang. Arus informasi semacam ini mencerminkan tidak adanya *mutual respect* antara dua kubu negara tersebut. Komunikasi internasional dengan penyebaran informasi satu arah menunjukkan betapa negara maju telah mendominasi komunikasi internasional. Komunikasi semacam ini telah dijadikan pula oleh negara-negara maju sebagai alat kontrol terhadap kekuatan sosial yang dikendalikan oleh kekuatan politik dalam percaturan politik internasional. Komunikasi internasional melalui jalur jurnalistik ini bahkan sering dipergunakan untuk tujuan-tujuan propaganda dengan tujuan akhir untuk mengubah kebijakan dan kepentingan suatu negara, atau memperlemah posisi negara lawan.
- c. Perspektif propagandistik, bidang komunikasi internasional lebih ditujukan untuk menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain dan dipacu sedemikian kuat agar mempengaruhi pemikiran, perasaan, serta tindakan. Tujuan ini mencakup perolehan dan penguatan atau perluasan dukungan rakyat dan negara sahabat, mempertajam atau mengubah sikap dan cara pandang suatu gagasan atau suatu peristiwa atau kebijakan luar negeri

negara tertentu, pelemahan atau peruntuhan pemerintah asing atau penggalangan kebijakan serta program nasional negara tidak bersahabat, serta netralisasi atau penghancuran propaganda tidak bersahabat dari negara atau kelompok lain. Selama ini, propaganda memang diakui merupakan instrumen yang paling ampuh untuk memberikan pengaruh.⁵²

P.H. Collin dalam bukunya yang berjudul *Dictionary of Politics and Government: Third Edition* menyatakan bahwa propaganda merupakan “pernyataan yang menjelaskan kebijakan atau tindakan suatu pemerintah dalam cara untuk mengajak orang-orang untuk percaya bahwa pemerintah tersebut betul dan benar.”⁵³ Propaganda merupakan media yang digunakan dalam perang urat syaraf. Menurut situs www.newworldencyclopedia.org, *Psychological Warfare* atau Perang Urat Syaraf merupakan, “sebuah taktik yang melibatkan penggunaan propaganda atau metode-metode yang sama untuk melemahkan moral musuh sebagai upaya untuk memastikan kemenangan, bahkan tanpa menggunakan kekerasan fisik.”⁵⁴

Pada zaman globalisasi sekarang ini, memudahkan kita dalam mencapai sesuatu baik informasi maupun hal-hal yang bersifat melintasi batas Negara. Tak diragukan lagi bahwa dominasi *non-state actor* dalam era globalisasi ini cukup pesat perkembangannya. Seperti yang dikemukakan oleh Khasan Ashari tentang definisi *non-state actor* bahwa:

“Non-State Actor adalah konsep yang digunakan secara luas untuk menyebut aktor dalam hubungan internasional yang tidak mewakili

⁵² *Ibid.*, hlm. v-vii.

⁵³ P.H. Collin, *Op.Cit.*, hlm. 194.

⁵⁴ "Psychological Warfare", dalam http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Psychological_warfare, diakses 20 April 2016.

Negara atau pemerintah. *Non-State Actor* umumnya dibagi menjadi dua kategori yaitu (1) aktor transnasional seperti organisasi non-pemerintah, media, kelompok teroris, kelompok pemberontak, organisasi kejahatan, kelompok keagamaan, kelompok kepentingan dan diaspora; dan (2) organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari Negara-negara. *Non-State Actor* menjalankan sejumlah peran dalam hubungan internasional, antara lain (a) mempromosikan sebuah isu menjadi agenda internasional; (b) mempublikasikan sikap masyarakat atas persoalan pada tingkat regional maupun global; (c) melobi Negara untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingannya; dan (d) mewujudkan tujuan melalui aksi langsung. Peran *non-state actor* semakin meningkat sejalan dengan perkembangan isu dan permasalahan dalam hubungan internasional yang semakin kompleks serta keterbatasan kemampuan Negara untuk menangani setiap isu dan permasalahan secara komprehensif.”⁵⁵

Dilihat dari teori diatas terlihat jelas bahwa Negara Islam merupakan suatu aktor non-negara yang memiliki kepentingannya tersendiri juga Negara Islam dapat dikatakan sebagai gerakan milisi karena aksi-aksi yang sebagian besar berasal dari kalangan sipil. Seperti pendefinisian dari Khasan Ashari tentang milisi dalam bukunya yang mengatakan bahwa:

“Organisasi dengan pola militer yang beranggotakan orang-orang dari kalangan sipil dan umumnya terbentuk pada situasi darurat. Meskipun memiliki konotasi netral, dewasa ini militia atau milisi sering dikaitkan dengan perang sipil dan instabilitas politik sebuah negara. Milisi dapat dikategorikan sebagai aktor hubungan internasional ketika terlibat dalam konflik yang memiliki dimensi internasional. Milisi Hezbollah di Lebanon merupakan salah satu contoh karena keberadaannya yang didukung oleh pemerintah asing dan keterlibatannya dalam konflik dengan aktor negara yaitu Israel.”⁵⁶

Negara Islam termasuk ke dalam organisasi jihad-Salafi Islam. Salafisme adalah gerakan ekstrimis agama-politik Sunni dalam Islam yang berusaha untuk mengembalikan era keemasan Islam (pada saat Nabi Muhammad SAW dan awal kekhalifahan). Menurut ideologi jihad-Salafi, jihad adalah suatu tugas pribadi setiap Muslim terhadap musuh baik internal maupun eksternal.⁵⁷ Awalnya, gerakan Salafi

⁵⁵ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 321.

⁵⁶ Khasan Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 295.

⁵⁷ "ISIS: Potrait of a Jihadi Terrorist Organization", *Op.Cit.*, hlm. 3.

difokuskan pada studi agama, hati dan pikiran (*dakwah*) sebagai cara untuk menciptakan masyarakat Islam dan Negara yang diperintah oleh hukum Islam. Namun, dalam gerakannya, ada faksi ekstrimis Salafi yang disebut dengan *Salafiyya Jihadiyya* telah berkembang, dimana al-Qaeda dan organisasi jihad global, termasuk Negara Islam, muncul. Secara ideologi memberikan kontribusi penting untuk perkembangan gerakan yang dibuat oleh Sayyid Qutb (1906-1966), seorang ideolog Mesir yang terinspirasi ide pembentukan organisasi Islam yang mendukung perjuangan kekerasan (termasuk *The Egyptian Islamic Jihad*, yang dipimpin oleh Ayhman al-Zawahiri).⁵⁸

Dari perspektif jihad-Salafi, Muslim harus berusaha untuk menyebarkan dan menerapkan Islam dalam semua bidang kehidupan dengan membebaskan negeri Islam dari budaya lain (terutama Barat) melalui jihad, yang dianggap sebagai tugas pribadi dari setiap Muslim. Jadi, Muslim harus melawan musuh-musuh Islam melalui perjuangan militer, kekerasan dan tanpa kompromi. Selain itu, musuh-musuh Islam tidak hanya eksternal (terutama Amerika Serikat dan Barat), tetapi juga rezim Arab yang bekerja sama dengan Barat atau sekuler rezim Arab yang dianggap “kafir”. Oleh karena itu, menurut jihad-Salafi, hukum agama Islam membenarkan untuk menggulingkan mereka.⁵⁹

Dengan ideologi Islam radikal yang diterapkan Negara Islam dan memberikan pengaruh terhadap perpolitikan dunia serta eksistensinya di media sosial, menjadikan Negara Islam begitu dikenal oleh masyarakat dunia, tidak heran bahwa begitu banyak

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁹ *Ibid.*

Muslim dari berbagai penjuru dunia ingin bergabung dengan Negara Islam. Mengenai definisi dari kata pengaruh tersebut, Jack C. Plano dkk. dalam bukunya *Kamus Analisa Politik* menyatakan bahwa:

“Pengaruh adalah kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah-laku orang lain dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Penggunaan pengaruh yang berhasil dapat menyebabkan perubahan-perubahan (atau mencegah perubahan-perubahan yang tidak diinginkan) pada kecenderungan, pendapat, sikap dan keyakinan atau pada tingkah-laku lain yang dapat terlihat. Kemampuan pelaku mempengaruhi orang lain tergantung pada banyak faktor. Di antaranya adalah faktor kekuasaan politik mereka, bentuk dan tingkat pengaruh yang digunakan, cakupan tugas atas dasar wewenang dan pengaruh, kualitas kompetitif dari pihak lain yang juga tengah melancarkan pengaruh dan derajat tuntutan penyesuaian.”⁶⁰

Negara Islam memiliki tujuan untuk membentuk Negara Khilafah yang berlandaskan Hukum Islam (*syari'ah*). Khilafah sendiri mempunyai pengertian secara bahasa berarti kepemimpinan. Sedangkan menurut istilah, para ulama fiqih mendefinisikan sebagai berikut:

قَامَةَ أَحْكَامِ الشَّرْعِ وَحَمَلَ رِئَاسَةَ عَامَةً فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَهِيَ رِئَاسَةُ عَامَةً لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي الدُّنْيَا لِإِ
الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِ

Artinya : “Kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia. Dengan kata lain, yaitu kepemimpinan umum bagi umat Islam secara keseluruhan di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara dan mengemban dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia”⁶¹

Hanya saja tujuan mulianya ini tidak bersamaan dengan tindakan yang dilakukan Negara Islam dalam mencapai tujuannya tersebut seperti aksi terror. Tindakan yang dilakukan oleh Negara Islam bisa disebut dengan gerakan yang memiliki tujuan-tujuan politik dengan berbasis milisi. Gerakan ini disebut dengan

⁶⁰ Jack C. Plano dkk., *Op.Cit.*, hlm. 112.

⁶¹ “Khilafah”, dalam <http://mbegedut.blogspot.co.id/2010/12/pengertian-tujuan-dan-dasar-khilafah.html>, diakses 12 Januari 2016.

political movement, seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik* bahwa:

“Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat di antara anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok yang kuat.”⁶²

Menurut konsep Negara Islam, era keemasan Islam akan dikembalikan melalui pembentukan suprasional model kekhalifahan Islam setelah seperti khalifah pertama setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam (*syari'ah*) yang akan menguasainya, menurut interpretasi yang paling ekstrem. Khilafah akan muncul pada runtuhnya negara-bangsa yang didirikan di Timur Tengah setelah Perang Dunia Pertama. Beberapa dari mereka, termasuk Suriah dan Irak, tempat dimana Negara Islam beroperasi, sedang dalam proses dari disintegrasi yang dibangun dari pergolakan di Timur Tengah, menciptakan kondisi yang paling menguntungkan demi visi Kekhalifahan Islam.⁶³

Wilayah dari Negara Khilafah, yang pendiriannya dinyatakan oleh Abu Bakr al-Baghdadi, terletak di Suriah Timur dan Irak Barat. Negara Islam berusaha untuk memperluas wilayahnya ke seluruh Suriah dan Irak dan akhirnya mengambil kendali dari mereka. Setelah itu, akan mencaplok negara yang lebih besar dari Suriah seperti Yordania, Lebanon, Israel, otoritas Palestina, dan negara-negara sekitar Timur Tengah. Menurut visi Negara Islam, masa depan Khilafah Islam akan mencakup dan

⁶² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 162.

⁶³ "ISIS: Potrait of a Jihadi Terrorist Organization", *Op.Cit.*, hlm. 3.

membentang luas dari Afrika Utara, Asia dan Kaukasus, serta bagian Eropa yang dulunya di bawah kekuasaan Islam seperti Spanyol dan Balkan.⁶⁴

Berdasarkan paparan konseptual di atas, maka penulis mencoba membuat konklusi untuk mendukung dan mengarahkan kepada Hipotesis, penulis mencoba untuk menguraikan dan mengemukakan beberapa asumsi, antara lain :

1. Gerakan politik Negara Islam yang berideologikan radikal serta memiliki tujuan untuk mendirikan suatu Negara Khilafah di bawah hukum Islam. Agar tujuannya tercapai, mereka melakukan perjuangan dalam bentuk serangan fisik (kekerasan) dan non-fisik (propaganda) sehingga memberikan ancaman terror sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemimpinnya.
2. Suatu kawasan dikatakan aman apabila stabilitas politik dan keamanannya tidak terganggu dari bahaya atau ancaman suatu pihak baik dari dalam maupun luar, baik aktor negara maupun aktor non-negara sehingga stabilitas politik dan keamanannya terjamin.
3. Dengan adanya gerakan politik Negara Islam dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik-keamanan di Eropa.
4. Dengan melakukan tindakan pencegahan yang menjadi bagian dalam memelihara stabilitas politik dan keamanan.

⁶⁴ *Ibid.*

2. Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan berbagai asumsi dalam kerangka teoritis di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai dugaan atau asumsi serta merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

"Jika bentuk perjuangan gerakan politik Negara Islam dijadikan instrumen dan media bagi pembentukan Negara Khilafah, maka upaya pencegahan akan mengalami peningkatan seiring dengan upaya dalam memelihara stabilitas politik-keamanan di Eropa."

3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empiris dan Analisis)

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi Operasional Variabel tentang konsep hipotesis, yaitu :

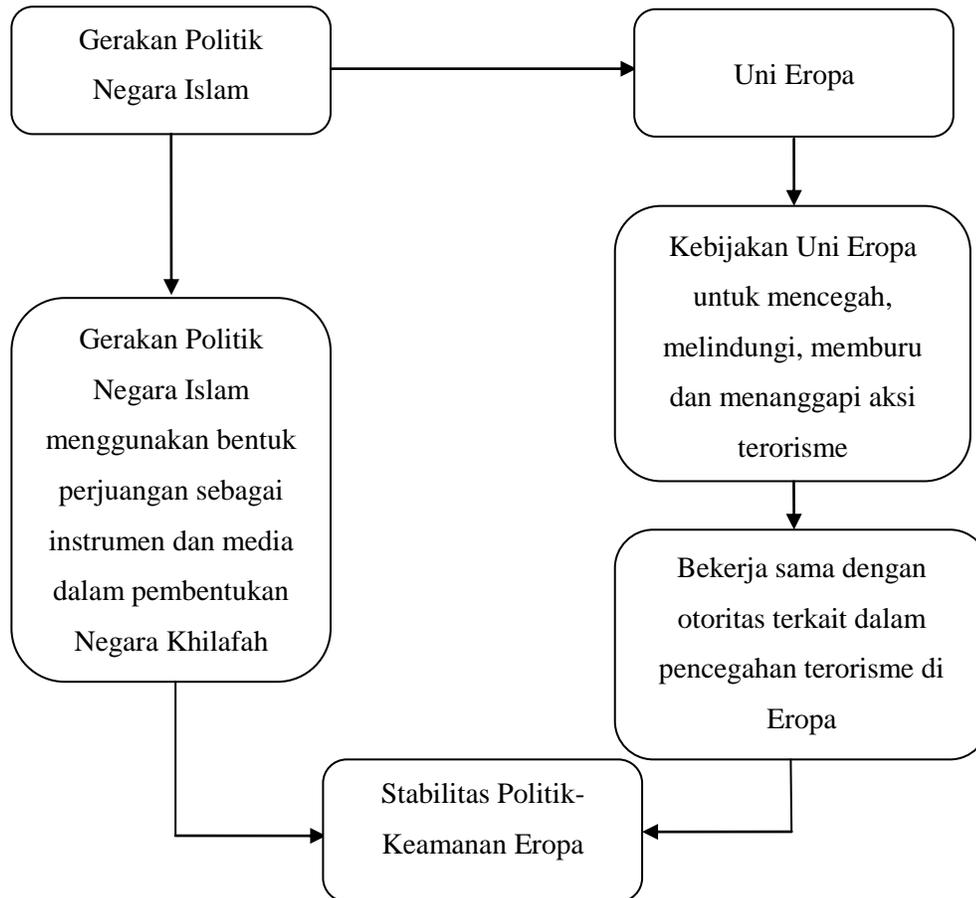
Tabel 1: Operasional Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Varibel (Analisis)
Bentuk perjuangan gerakan politik Negara Islam dijadikan instrumen dan media bagi pembentukan Negara Khilafah.	1. Instrumen gerakan perjuangan Negara Islam	1. Data mengenai pejuang asing yang memberikan 'kejutan' di Negara asalnya (Eropa) sebagai salah satu strategi Negara Islam dalam pembentukan Negara Khilafah. Sumber: http://www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-State-ISIS-Smuggler-THOUSANDS-Extremists-into-Europe-Refugees 2. Data mengenai perjuangan Negara Islam dalam bentuk terror bom bunuh diri.

	<p>2. Memanfaatkan media sebagai alat perjuangan.</p>	<p>Sumber:http://www.understandingwar.org/backgrounder/isiss-campaign-europe-march-2016</p> <p>3. Data mengenai media sebagai alat propaganda dalam meradikalisasi pihak-pihak tertentu untuk bergabung ke Negara Islam. Sumber:http://www.gcsp.ch/download/2763/72138 dan http://www.soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_Foreign_FightersUpdate3.pdf</p>
<p>Upaya pencegahan akan mengalami peningkatan seiring dengan upaya dalam memelihara stabilitas politik-keamanan di Uni Eropa.</p>	<p>3. Agenda keamanan Eropa dalam mencegah terorisme.</p> <p>4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas terkait.</p>	<p>4. Data mengenai ancaman-ancaman terorisme, kejahatan terorganisir lintas-batas dan <i>cybercrime</i> yang mengganggu stabilitas keamanan di Eropa. Sumber:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf</p> <p>5. Data mengenai pertukaran informasi dan peningkatan kerjasama operasional baik antara badan Uni Eropa, agensi-agensi Uni Eropa dan Negara-negara anggota. Sumber:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf</p> <p>6. Data mengenai pencegahan terorisme juga radikalasi dan memfasilitasi koordinasi dan kerjasama otoritas terkait. Sumber: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf</p>

4. Skema Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran



E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Untuk mengarahkan penelitian ini perlu adanya anggapan dasar dan kerangka konseptual yang merupakan pijakan dasar penentuan dan penulisan hipotesa. Untuk keperluan penelitian penulis mencoba mengemukakan serangkaian teori, konsep, pemikiran para pakar dalam bentuk premis mayor dan premis minor sebagai acuan

ilmiah dalam mengeneralisasi pokok permasalahan dan mempunyai hubungan korelasional. Dari penjelasan tersebut untuk menetapkan jenis hubungan tingkat analisis antara lain unit analisis “strategi arah dan tindakan politik pemerintahan Uni Eropa dalam menghadapi gerakan Islam Radikal dan tindakan terorrisme” dan unit eksplanasi “Gerakan politik Negara Islam” maka tingkat analisis yang dilakukan dalam tingkatan yang sama.

2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil-hasil pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang berdasarkan realita. Data diorganisasikan secara sistematis untuk menggambarkan fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam pelaksanaannya metode ini tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data.
- b. Metode Historis Analitis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa fenomena-fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literatur atau referensi baik yang bersumber dari artikel-artikel, surat kabar, jurnal, internet maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data di beberapa tempat yang dianggap dapat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Maksud dari lokasi disini adalah tempat-tempat dimana peneliti mendapatkan data melalui studi kepustakaan dan disusun secara teratur. Berdasarkan penjelasan tentang lokasi penelitian di atas dan untuk memperoleh data yang diperlukan guna menunjang penelitian serta mampu menyediakan bahan ataupun data yang berguna bagi penelitian ini.

Adapun lokasi penelitian sebagai berikut :

a. Perpustakaan FISIP UNPAS

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

2. Lama Penelitian

G. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Bab ini menguraikan tentang transformasi lahirnya ideologi Islam Radikal yang menjadi titik awal lahirnya Negara Islam.
- BAB III** : Bab ini menguraikan tentang arah dan tindakan serta respon Uni Eropa dalam menjaga stabilitas politik-keamanan di Eropa.
- BAB IV** : Bab ini berisi analisis atau uji hipotesis yang terdiri dari hubungan dua indikator dari dua variable dan indikator-indikator dari variable terkait.
- BAB V** : Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.